

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan politik dapat diidentifikasi pada tiga bagian utama, yaitu: sumber kekuasaan, distribusi kekuasaan, dan pelaksanaan kekuasaan.¹ Menurut Ramlan Surbakti, perihal sumber kekuasaan tidak terdapat masalah etika.² Sebab, perihal siapa pemilik kekuasaan bukanlah suatu persoalan etika, tetapi persoalan epistemologi. Dalam ajaran Islam, sumber kekuasaan adalah Allah SWT.³ Kekuasaan tersebut kemudian diberikan kepada manusia sebagai Khalifah Allah SWT dan kepada seseorang yang dikehendaki-Nya.⁴ Kekuasaan yang diberikan oleh Allah, baik untuk masyarakat maupun untuk perorangan termasuk kekuasaan dalam pengertian politik.⁵

Adapun dalam persoalan distribusi dan pelaksanaan kekuasaan barulah terdapat beberapa nilai etika. Alasannya ialah karena kedua hal tersebut merupakan perbuatan politik. Seyogyanya nilai-nilai etik bila diaplikasikan dalam kehidupan politik, maka akan menciptakan sikap dan perilaku politik yang etis. Namun dalam realitasnya kehidupan politik tidak selamanya berdasar pada nilai-nilai etika, bahkan kadang kala terjadi penyimpangan yang memprihatinkan. Seperti kasus yang terjadi pada masa sekarang ini dalam konsep pemerintahan.

Pada kajian sejarah filsafat, pembahasan etika sudah ada sejak sebelum adanya negara yang mengatur tata kehidupan manusia dan masyarakat. Misalnya dalam era Yunani Kuno, pembahasan etika (filsafat moral) di mulai pada abad ke V SM. Para tokoh-tokoh yang membahas etika pada masa itu ialah seperti; Phytagoras, Sokrates, Plato, dan Aristoteles.⁶

¹Saleh Putuhena, *Historigrafi Haji Indonesia*, (Yogyakarta: LKIS, 2007), h. 257-258

²Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Yogyakarta: Grasindo, 1992), h. 4-5.

³Ahzami Samiun Jazuli, *Kehidupan dalam Pandangan Al-Qur'an*, Terj. Saru Narulita, Miftahul Jannah, dkk, Cet. (Jakarta: Gema Insani, 2006), h. 43

⁴Ibnu Khaldun, *Muqaddimah; An Introduction to the History of the World*, Terj. Ahmadi Thaha, (Jakarta: Wali Pustaka, 2019), h. 175.

⁵Saleh Putuhena, *Historigrafi Haji...*, h. 258.

⁶Harun Hadiwijoyo, *Sari Sejarah Filsafat*, Cet. ke-11, (Yogyakarta: Kanisius, 1995), h. 52.

Selanjutnya perkembangan etika di kelompokan menjadi dua, yaitu etika umum dan etika khusus.⁷ Etika umum berfokus pada mempertanyakan prinsip-prinsip dasar yang berlaku bagi segenap tindakan manusia, sedangkan etika khusus fokus membahas prinsip-prinsip dasar tindakan manusia dalam hubungannya dengan kewajiban manusia dalam berbagai ruang lingkup kehidupannya. Oleh karena setiap individu hidup bersama individu lainnya dalam masyarakat, maka dalam tatanan masyarakat terdapat etika sosial.

Bertumpu dari martabat manusia sebagai pribadi yang sosial, oleh karenanya etika sosial membahas norma-norma yang seharusnya menentukan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia. Sehingga, yang termasuk ke dalam wilayah etika sosial adalah etika politik atau filsafat moral mengenai dimensi politis kehidupan manusia.⁸ Dengan demikian etika politik merupakan problematika dan tantangan manusia sepanjang sejarahnya. Namun pada dasarnya peradaban manusia telah melahirkan nilai-nilai etis yang mulia, tetapi kemuliaan nilai-nilai tersebut masih memiliki kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan.

Agama Islam hadir di tengah bangsa Arab yang sedang mengalami kemerosotan etika, sehingga misi utama nabi Muhammad diutus sebagai Rasul Islam terakhir ialah untuk menuntun dan membimbing gejolak ambisi manusia, sebagaimana sabda Rasulullah SAW; *“Innama buitstu li utammima makarima al akhlaq”* (Tidaklah diriku diutus melainkan untuk menyempurnakan akhlak). Sama halnya dengan kehadiran kajian etika politik sebagai upaya untuk mengatasi ketimpangan-ketimpangan politik dari pemegang kekuasaan untuk menjalankan tugasnya dengan baik dan mementingkan kepentingan orang lain, memperluas ruang lingkup kebebasan serta membangun institusi-institusi yang adil, sebab pelaku-pelaku politik dalam upaya mencapai tujuan politik sering menggunakan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika untuk mencapai tujuan politiknya.⁹

⁷Fanz Magins Suseno, *Etika Politik; Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Cet. ke-8, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016), h.13.

⁸David Aper, *Pengantar Analisa Politik*, (Jakarta: Rajawali Pressm 1985), h.330.

⁹Haryatmoko, *Etika Politik dan Kekuasaan*, (Jakarta: Kompas, 2003), h. 204.

Bagi para pemikir politik Islam, antara politik dengan etika memiliki hubungan yang erat. Bedanya dengan para pemikir Barat ialah keterhubungan tersebut bagi Barat berada dalam wilayah filsafat moral, sedangkan para pemikir politik Islam melihat keterhubungan tersebut dalam ruang lingkup teologi. Dengan demikian dalam Islam persoalan politik tidak dapat dipisahkan dengan persoalan agama.¹⁰ Oleh karenanya pemikiran politik telah menjadi persoalan yang paling banyak di alami oleh kaum intelektual muslim, hal tersebut dapat dijelaskan dalam perjuangan yang tengah berlangsung di kalangan rakyat muslim di berbagai negara untuk memperoleh kemerdekaan politik dan kebebasan dari ketergantungan kepada kekuatan-kekuatan Barat.¹¹ Adapun beberapa tokoh-tokoh intelektual muslim yang berorientasi pada kebijakan sistem bernegara dan etika adalah Ibnu Khaldun dan Nurcholis Madjid, kedua tokoh tersebut telah membawa perubahan-perubahan besar dalam dunia Islam.

Ibnu Khaldun dalam karyanya yang berjudul *Muqaddimah*, memperkenalkan teori kekuasaan dan peradaban, serta menguraikan secara radikal mengenai tipe tipe solidaritas sosial (*'ashabiyyah*).¹² Dalam hal sosial-politik *'ashabiyyah* adalah suatu aliansi kesukuan, kesamaan kepentingan dan kesamaan nasib. Sehingga kendatipun ikatan darah adalah sumber *'ashabiyyah* yang paling dasar, tetapi hal tersebut bukan satu-satunya faktor yang membentuk *'ashabiyyah*. Namun yang perlu digarisbawahi adalah adanya unsur kedekatan (*al-iltiham*) yang lahir dari akibat kesamaan nasab atau faktor-faktor lainnya. Dengan demikian konsep *'ashabiyyah* Ibnu Khaldun tidaklah bersifat genetik tetapi fungsional dan Ibnu Khaldun mengembangkan konsep tersebut dari makna konvensional dan

¹⁰Nurcholis Madjid, "Agama dan Negara dalam Islam; Telaah atas Fiqh Siyasyah Sunni," dalam *Budy Munawar-Rachman, ed, Konteksualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, (Jakarta: Paramadina, 1994), h. 588.

¹¹Khalid Ibrahim Jinda, *Teori Politik Islam, Telaah Kritis Ibnu Taimiyah tentang Pemerintahan Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), h. 89

¹²Ibnu Khaldun, *Muqaddimah; An Introduction to the History of the World, Terj. Ahmadie Thaha*, Cet. ke-1, (Jakarta: Wali Pustaka, 2019), h. 228-667.

berusaha menawarkan satu teori perubahan politik yang memiliki aplikasi universal.¹³

Seperti dijelaskan sebelumnya, maka *'ashabiyyah* berasal dari *badawah*. Dengan kata lain konsep tersebut terbentuk dari luar hadarah atau mulk bukan sebagai konsekuensi logis melainkan sebagai akibat dari kedekatan kontak antara satu anggota masyarakat dengan anggota masyarakat lain disebabkan suatu kondisi sulit *al-badawah*. Sehingga secara logis, dibutuhkan waktu yang tidak sebentar hingga *'ashabiyyah* kelompok termanifestasi dan ketika sudah terbentuk, *'ashabiyyah* menjadi kekuatan penggerak yang mampu mendorong suatu kelompok untuk bertindak secara kolektif. Oleh karenanya bisa diasumsikan bahwa sampai *'ashabiyyah* terbentuk, individu cenderung untuk bersikap pasif dan akan bereaksi saat terdapat stimulus eksternal. Sementara setelah *'ashabiyyah* terbentuk individu akan aktif dan determinan pada lingkungannya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kondisi sulit tidak secara otomatis menghasilkan reaksi berupa tindakan kolektif. Namun kondisi sulit menciptakan 'medan' yang membuat *'ashabiyyah* berkembang dan sebaliknya, *'ashabiyyah* lah yang menggerakkan sekelompok individu untuk bertindak secara kolektif. Lebih lanjut maka sekiranya di dalam fungsi sentral dari *'ashabiyyah* lah terdapat rumusan etika politik Ibnu Khaldun, yakni; memberikan proteksi (*al-himayah*), dorongan saling membela (*al-mudafa'ah*), kekuatan penekan (*al-mutalabah*), dan aktivitas sosial-individu lainnya.

Sudut pandang fungsi utilitarian dari agama, Pitirim A. Sorokin menyatakan bahwa Ibnu Khaldun sejajar dengan Plato, Aristoteles, Giambattista Vico, St. Thomas Aquinas sebagai tokoh-tokoh pemikir idealis.¹⁴ Berbeda dengan pandangan Pitirim A. Sorokin yang bersifat pro, P. von Sivers, dalam artikelnya menyatakan bahwa Ibnu Khaldun sama sekali tidak memberikan kontribusi

¹³Nawan Yulianto & Muhamad Syauqillah, *Asabiyyah dan Konsep Transformasi Sosio-Politik Ibn Khaldun: Relevansi Kontemporer Politik dan Tribalisme di Timur Tengah*, MEIS: Jurnal Middle East and Islamic Studies, Vol. 6. No. 1. (2019), h. 30. DOI: <https://doi.org/10.7454/meis.v6i1.76>

¹⁴Pitirim A. Sorokin, *Sociological Theories of Today*, (New York: Harper & Row, 1966), h. 308.

terhadap ilmu pengetahuan dan karya Muqaddimah Ibnu Khaldun sebagai “...is curiously twisted, grand misconception of the historical process.”¹⁵ Sedangkan Fuad Baali memberikan pandangan yang lebih moderat terhadap Ibnu Khaldun;

“... does not indiscriminately praise everything Ibn Khaldun wrote in his *Muqaddimah*, nor does it criticize his whole work in a few dogmatic statements.”¹⁶

Lebih lanjut, Fuad Baali membandingkan pemikiran Ibnu Khaldun dengan beberapa pemikir Barat, di antaranya yaitu Niccolò Machiavelli (1469-1527),

Jean Bodin (1530-1596), Montesquieu (1689-1755), Auguste Comte (1798-1857), Karl Marx (1818-1883), Émile Durkheim (1858-1917), Georg Simmel (1858- 1918), Julius Robert Oppenheimer (1904-1967), dan Maximilian Weber (1864- 1920).¹⁷ Melalui berbagai pandangan yang saling berbenturan mengenai Ibnu Khaldun dan pemikiran-pemikirannya merupakan suatu indikasi dari kenyataan bahwa Ibnu Khaldun dan al-Muqaddimah nya masih belum juga usang untuk diteliti lebih mendalam, terkhususnya pemikiran Ibnu Khaldun tentang etika politik yang terdapat dalam konsep ‘ashabiyyah nya.

Kemudian dalam konteks keindonesiaan Nurcholis Madjid adalah salah satu pemikir Islam terbaik di Indonesia yang telah memberikan kontribusi pada pemikiran-pemikiran keislaman kontemporer, khususnya apa yang Nurcholis Madjid sebut pada tahun 1990 sebagai mempersiapkan “umat Islam Indonesia memasuki zaman modern.”¹⁸ Jargon Nurcholis Madjid yang terkenal, “Islam, Yes, Partai Islam, No.,” misalnya mau mengatakan bahwa, partai Islam kini bukan hal yang esensial, dan tidak berhubungan dengan esensi keislaman. Dengan demikian makna “sekularisasi” yaitu mengembalikan mana yang sakral, sebagai sakral, dan

¹⁵P. von Sivers, *Back to Nature: The Agrarian Foundations of Society According to Ibn Khaldun*. Arabica, Vol. 27 No. 1, h.68-91.

¹⁶Fuad Baali, *Society, State, and Urbanism: Ibn Khaldun's Sociological Thought*, (New York: State University of New York Press, 1988), h.ix.

¹⁷Fuad Baali, *Society, State, and Urbanism....*,h 64-67.

¹⁸Nurcholis Madjid, *Islam, Kemodernan, dan Keindonesiaan*, (Bandung: Mizan, 1987), h.89-90.

yang profan, sebagai profan. Oleh karenanya politik Islam yang banyak dimaknai oleh umat Islam adalah cita-cita mendirikan negara Islam ialah suatu yang “sakral”, menjadi bagian dari perjuangan Islam, yaitu “didesakralisasi” pemaknaan tersebut.¹⁹

Gagasan pembaharuan Nurcholis Madjid di atas adalah yang paling kontroversial, dan telah menyebabkan polemik berlarut-larut hingga sampai sekarang ini. Dalam hal pertama, Nurcholis Madjid mengatakan;

“Jika partai-partai Islam merupakan wadah dari ide-ide yang hendak diperjuangkan berdasarkan Islam, maka jelaslah bahwa ide-ide itu sekarang dalam keadaan tidak menarik... ide-ide dan pemikiran-pemikiran Islam itu sekarang sedang menjadi *obsolete*, menfosis, kehilangan dinamika... partai-partai Islam tidak berhasil membangun imej yang positif dan simpatik.”²⁰

Melalui gagasan di atas, Nurcholis Madjid hendak membuat pemisah antara Islam dan partai Islam. Perjuangan Islam melalui partai Islam, hanyalah satu kemungkinan dan masih ada kemungkinan lain. Persoalan inilah yang dimaksudkan dengan sekularisasi seperti gagasan Nurcholis Madjid ialah memisahkan mana yang sakral dan mana yang profan.²¹ Adapun penggunaan kata sekularisasi dalam sosiologi mengandung arti pembebasan, yaitu pembebasan dari sikap penyucian yang tidak pada tempatnya. Oleh karena itu mengandung makna desakralisasi, yaitu pencopotan ketabuan dan kesakralan dari objek-objek yang semestinya tidak tabu dan sakral. jika diproyeksikan kepada situasi modern Islam sekarang, maka ‘sekularisasi’ akan mengambil bentuk pemberantasan *bid'ah*, *khurafat*, dan praktik syirik lainnya. Seperti dalam bahasa Nurcholis Madjid, “sekularisasi adalah konsekuensi dari tauhid”.

Melalui kesimpangsiuran pengertian istilah tersebut, tidak kurang dari seratus tulisan artikel pada tahun 1970-an telah terbit menyambut gagasan Nurcholis Madjid, yang muncul dalam surat kabar; *Abadi*, *Kompas*, *Mercu Suar*,

¹⁹ Nurcholis Madjid, *Islam, Kemodernan....*, h.262.

²⁰ Nurcholis Madjid, *Islam, Kemodernan....*, h.67.

²¹ Nurcholis Madjid, *Islam, Kemodernan....*, h.68.

Indonesia, dalam majalah mingguan; Panji Masyarakat, Angkatan Baru, Mimbar Demokrasi, Forum, Tempo, dan sebagainya. Reaksi yang emosional berkaitan dengan kerumitan sial terminologi tersebut, seperti “sekularisasi disifatkan sebagai jembatan ke arah komunisme,” atau “komunisme adalah anak sekularisme.” Atau, “Sekularisme meniadakan atau menghampakan segala sangkut-paut tindakan negara dan pribadi dengan Tuhan” dan sebagainya. Jika dirumuskan dalam perdebatan sekarang ini, maka banyak orang awam menganggap, pemikiran Nurcholis Madjid cenderung sekular, Barat-oriented, terjebak pemikiran Yahudi, berorientasi elitis, memberi angin kepada Kristenisasi, keterangannya membuat umat bingung, teologinya mengganggu keamanan iman dan lembaga keagamaan, banyak pengertian-pengertian yang rancu, *counter productive* terhadap perjuangan umat, ikut merangsang reaksi fundamentalis, menimbulkan skeptisisme terhadap agama, bahkan menyimpang dari ajaran Islam.

Merujuk pada kontroversial pemikiran Nurcholis Madjid dan pada berbagai pandangan yang saling berbenturan mengenai gagasan politik dan sekularisasi Nurcholis Madjid, merupakan suatu indikasi dari kenyataan bahwa gagasan Nurcholis Madjid masih belum juga usang untuk diteliti lebih mendalam, terkhusus mengenai etika politik. Nurcholis Madjid, berpendapat bahwa kehidupan politik tidak boleh meninggalkan nilai-nilai keagamaan, sebab kehidupan politik yang pada dasarnya bersifat duniawi, tidak bisa lepas dari tuntutan moral yang tinggi. Dengan demikian berpolitik haruslah bersandar pada akhlak mulia,²² yang sekarang dikenal dengan istilah etika politik.

Lebih lanjut menurut Nurcholis Madjid, gagasan pokok eksperimen politik Islam merujuk pada politik di Madinah, yaitu adanya suatu tatanan sosial-politik yang diperintah, namun tidak oleh kemauan pribadi, melainkan secara bersamasama. Jadi tidak oleh prinsip-prinsip yang dapat berubah-ubah sejalan dengan kehendak pemimpin, melainkan oleh prinsip-prinsip yang telah

²²Nurcholis Madjid, *Cendekiawan dan Religiusitas Masyarakat*, (Jakarta: Tekad dan Paramadina, 1999), h.52.

dilembagakan dalam dokumen kesepakatan dasar semua anggota masyarakat, yang dewasa ini disebut dengan “konstitusi”.²³

Jelaslah, bahwa perbandingan gagasan politik Ibnu Khaldun dan Nurcholis Madjid memiliki kesamaan yang mendasar, dengan perbedaan Ibnu Khaldun masih mencari jalan, dan Nurcholis Madjid sudah berpikiran lebih radikal dan definitif. Selain itu, Ibnu Khaldun dan Nurcholis Madjid sama-sama hidup dalam kondisi politik yang krisis dan penuh konflik, kendatipun berbeda dalam kurun waktu. Melalui uraian di atas, maka penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian mengenai **“Perbandingan Pemikiran Etika Politik Ibnu Khaldun dan Nurcholis Madjid.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini ialah:

1. Bagaimana Pemikiran Etika Politik Ibnu Khaldun dan Nurcholis Madjid?
2. Relevansi Perbedaan dan Persamaan Pemikiran Etika Politik Ibnu Khaldun dan Nurcholis Madjid?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan umum dari penelitian ini ialah:

1. Untuk Mengetahui Pemikiran Etika Politik Ibnu Khaldun dan Nurcholis Madjid.
2. Untuk Menguraikan Secara Kritis Perbedaan dan Persamaan serta relevansi Pemikiran Etika Politik Ibnu Khaldun dan Nurcholis Madjid.

Secara khusus penelitian komparasi akan memberikan pengertian baru, sebab garis dari masing-masing pandangan akan terlihat dengan lebih jelas dan tegas. Maka tujuan khusus dari penelitian ini ialah:

²³Nurcholis Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodernan*, (Jakarta: Paramadina, 1992), h.373.

1. Deskripsi

Memperlihatkan kesamaan dan perbedaan pemikiran etika politik Ibnu Khaldun dan Nurcholis Madjid, baik yang terlihat di dalam istilah, pendekatan, argumentasi, dan segi perhatian.

2. Evaluasi Kritis

Seperti yang diungkapkan oleh Thompson bahwa dengan membandingkan dua pandangan, maka akan memperlihatkan keterbatasan dari pandangan yang diperbandingkan, sehingga dapat lebih memperlihatkan kekuatan dan relevansi dari kedua pandangan tersebut.²⁴

Dengan demikian tujuan khusus dari penelitian ini adalah memperlihatkan kekuatan dan kelemahan masing-masing pandangan sebagai upaya untuk melihat relevansi pemikiran etika politik Ibnu Khaldun dan Nurcholis Madjid pada kehidupan politik bangsa Indonesia kini dan nanti.

D. Manfaat Penelitian

Dari tujuan umum dan khusus dari penelitian ini yang telah diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini akan menghasilkan pemahaman-pemahaman yang bernilai dari masing-masing pandangan Ibnu Khaldun dan Nurcholis Madjid untuk menjadi pemecahan masalah yang sedang di alami oleh bangsa Indonesia dan penelitian ini akan bermanfaat sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang kajian pemikiran politik Islam.

2. Secara Praktis

Penelitian ini akan memberikan manfaat pada penulis, masyarakat, dan universitas, yakni sebagai berikut:

- a. Penulis

Penelitian ini akan menambah wawasan penulis mengenai pemikiran politik Islam, terkhususnya etika politik Islam.

²⁴Jhon Thompson, *Critical Hermeneutics; a Study in the Thought of P. Ricoeur and J. Habermas*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1995), h.4.

b. Masyarakat

Penelitian ini akan membantu dalam memahami etika politik khususnya etika politik Islam. Sehingga masyarakat pada era sekarang dapat memastikan kehidupan politik yang lebih baik untuk masyarakat pada era selanjutnya.

c. Universitas

Penelitian ini akan menjadi suatu referensi yang penting bagi para akademisi yang ingin melakukan penelitian mengenai etika politik khususnya etika politik dalam Islam.

E. Batasan Istilah

Agar tidak menimbulkan adanya perbedaan pengertian dan pemaknaan. Dengan demikian di bawah ini diuraikan beberapa batasan istilah, yaitu sebagai berikut:

Perbandingan dalam kamus bahasa Indonesia diartikan sebagai (1) Pertimbangan; perbedaan (selisih), (2) Persamaan; ibarat, (3) Pedoman; pertimbangan.²⁵ Adapun dalam kamus tesaurus bahasa Indonesia, perbandingan memiliki sinonim dengan analogi, ibarat, kesetaraan, ketimpangan, komparasi, nisbah, parameter, patokan, pedoman, perbedaan, perimbangan, perpadanan, perpaduan, persamaan, pertimbangan, perumpamaan, proporsi, rasio, skala, tolak ukur.²⁶ Sedangkan dalam kamus Filsafat karya Lorens Bagus, perbandingan adalah suatu kegiatan yang menjajarkan antara dua objek atau lebih untuk mencari persamaan atau perbedaan di antara objek yang akan dibandingkan.²⁷ Dalam penelitian ini perbandingan yang di maksud ialah suatu kegiatan yang memperlihatkan persamaan dan perbedaan serta memperlihatkan kekuatan dan kelemahan dari masing-masing pemikiran sebagai upaya untuk melihat relevansi dari pemikiran-pemikiran yang diperbandingkan.

Pemikiran dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai proses, cara, perbuatan memikir. Pemikiran berasal dari kata 'pikir' yang memiliki arti

²⁵Dendy Sugono, *ed, Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h.128.

²⁶Dendy Sugono, *ed, Tesaurus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h 42.

²⁷Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005), h.824.

akal budi, ingatan, angan-angan. Kemudian dengan mendapatkan imbuhan ‘pe-an’ dalam tata bahasa Indonesia hal tersebut menunjukkan suatu perbuatan, maka ‘pemikiran’ dapat di definisikan sebagai cara atau hasil berpikir terhadap sesuatu, sehingga melahirkan gagasan, ide-ide, atau konsep-konsep yang diterima dan mungkin dipakai sebagai pedoman dalam kehidupan individu ataupun kelompok/masyarakat.²⁸ Sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia, pemikiran diartikan sebagai sesuatu yang diterima dan dipakai oleh seseorang atau kelompok sebagai pedoman.²⁹ Adapun dalam kamus tesaurus bahasa Indonesia, pemikiran memiliki sinonim dengan ajaran, aliran fikrah, filsafat, gagasan, haluan, ide, ideologi, opini, paham, pandangan, pendapat, perenungan, pikiran, refleksi, sentimen, spekulasi, timbangan.³⁰ Dengan demikian dalam penelitian ini pemikiran di maksudkan sebagai sebuah hasil berpikir yang telah menjadi sebuah gagasan dan tertuang di dalam tulisan-tulisan bersifat ilmiah.

Franz Magins Suseno menyatakan bahwa etika politik adalah filsafat moral tentang dimensi politis kehidupan manusia.³¹ Lebih lanjut Franz Magins Suseno mengungkapkan bahwa etika politik adalah praktik yang mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban manusia sebagai manusia dan bukan hanya sebagai warga negara dalam sebuah negara.³² Sedangkan menurut Denis Franks Thompson, etika politik ialah sebuah praktik melakukan penilaian etis atas tindakan politik. Lebih lanjut Thompson menyampaikan bahwa tujuan yang ingin dicapai dari etika politik ialah untuk mengarahkan manusia kepada hidup baik, bersama, dan untuk orang lain, dalam rangka memperluas lingkup kebebasan dan membangun institusi-institusi yang berkeadilan.³³ Dalam *Liberal and Conservatives Rel yon Different Sets of Moral Fondations*, Graham, Haidt, dan Nosek mengungkapkan bahwa ada dua kelas besar dalam landasan moral/etika politik, yaitu fondasi individual (*individualizing fondations*) dan fondasi yang

²⁸Hasan Alwi, ed, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Cet. ke-4, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h.873

²⁹Dendy Sugono, ed, *Kamus Bahasa Indonesia...*, h.1198.

³⁰Dendy Sugono, ed, *Tesaurus Bahasa Indonesia...*, h.376-377.

³¹Fanz Magins Suseno, *Etika Politik...*,h.9.

³²Fanz Magins Suseno, *Etika Politik...*,h.14.

³³Dennis Frank Thompson, *Political Ethics and Public Office*, (Cambridge: Harvard University Press, 1987).

mengikat (*binding foundations*).³⁴ Dalam fondasi individual terdapat fondasi keadilan/timbal balik (*ethic of justice*)³⁵ dan bahaya/kepedulian (*ethic of care*).³⁶ Fondasi pertama dalam ‘*individualizing foundations*’ berkaitan dengan keinginan seseorang untuk keadilan dan timbal balik, sedangkan yang terakhir berkaitan dengan sikap peduli seseorang terhadap orang lain.

Adapun fondasi yang mengikat terdiri dari *loyalty* (loyalitas), *authority/respect* (otoritas/penghormatan), dan *purity/sanctity* (kemurnian/kesucian). Dua yang pertama sesuai dengan etika komunitas (*ethic of community*)³⁷ dan mewakili kepemilikan dan keterikatan seseorang pada dinamika kelompok dan berkaitan dengan perasaan seperti patriotisme, kepatuhan, dll. Sedangkan landasan terakhir sesuai dengan etika ketuhanan (*ethic of divinity*)³⁸ dan mewakili keinginan seseorang untuk menekan/mengendalikan sifat manusia dari nafsu, keegoisan, dll. Dengan demikian etika politik memiliki tiga dimensi, yaitu: tujuan, sarana, dan aksi politik.³⁹

Dimensi ‘tujuan’ mengandaikan pada pencapaian kesejahteraan masyarakat dan hidup damai berlandaskan pada kebebasan dan keadilan. Dimensi ‘sarana’ memungkinkan pencapaian tujuan, dalam dimensi ini terdapat sistem dan prinsip-prinsip dasar pengorganisasian praktik penyelenggaraan negara dan juga mendasari institusi-institusi sosial. Adapun dalam dimensi ‘aksi politik’, pelaku memegang peran dalam menentukan rasionalitas politik yang terdiri dari rasionalitas tindakan dan keutamaan atau kualitas moral pelaku.

³⁴Jesse Graham, Jonathan Haidt, & Brian A. Nosek, Liberals and Conservatives rely on different sets of moral foundations., *Journal of Personality and Social Psychology*, 96 (5), h.1029-1046. <https://doi.org/10.1037/a0015141>

³⁵Lawrence Kohlberg, *Stage and Sequence: The Cognitive-Developmental Approach to Socialization*, dalam David A. Goslin, ed, *Handbook of Socialization Theory and Research*, (Chicago: Rand McNally, 1969), h.347-480.

³⁶Pembahasan lebih lanjut dapat di lihat pada Carol Gilligan, *In a Different Voice; Psychological Theory and Women's Development*, (Cambridge: Harvard University Press, 2003),

³⁷Pembahasan lebih lanjut dapat di lihat pada Richard A. Shweder, Nancy C. Much, Manamohan Mahapatra, & Lawrence Park, “The “Big Three” of Morality (Autonomy, Community, Divinity) and the “Big Three” Explanations of Suffering,” dalam Allan M. Brandt & Paul Rozin, ed, *Morality and Health*, (New York: Routledge, 1997), h.119-169

³⁸Pembahasan lebih lanjut dapat di lihat pada Pembahasan lebih lanjut dapat di lihat pada Richard A. Shweder, Nancy C. Much, Manamohan Mahapatra, & Lawrence Park, “The “Big Three”...”, h.119-169

³⁹Haryatmoko, *Etika Politik...*, h.27.

F. Tinjauan Pustaka

Secara umum tinjauan pustaka bertujuan untuk menjelaskan posisi penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dengan penelitian-penelitian terdahulu. Di bawah ini akan dijabarkan beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki tema yang sama dengan penelitian penulis, yaitu sebagai berikut:

1. Hanna Widayani. Jurnal, (2017). **‘Ashabiyah Ibnu Khaldun dan Relevansinya dengan Nasionalisme di Indonesia**. Hasil penelitian jurnal tersebut mengungkapkan bahwa: pertama, *Ashabiyah* diartikan oleh Ibnu Khaldun sebagai solidaritas sosial. Menurut Ibnu Khaldun solidaritas sosial atau rasa golongan yang dihubungkan oleh pertalian darah atau pertalian lain yang mempunyai arti dan tujuan yang sama. Hal ini disebabkan karena pertalian darah mempunyai kekuatan mengikat pada kebanyakan manusia, yang membuat mereka ikut merasakan tiap kesakitan yang menimpanya. *Ashabiyah* merupakan perasaan satu kelompok atau solidaritas sosial, yang timbul secara alamiah dalam kehidupan manusia karena adanya pertalian darah atau pertalian perkauman. Perasaan cinta kasih tersebut menimbulkan perasaan senasib, sepenanggungan, rasa saling setia, rasa saling membutuhkan, terlebih pada saat menghadapi musibah atau ancaman musuh, atau untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian Ibnu Khaldun berpendapat, orang tidak mungkin menciptakan negara tanpa dukungan rasa persatuan dan solidaritas yang kuat.⁴⁰
2. Nawan Yulianto & Muhamad Syaouqillah. Jurnal, (2019). **‘Asabiyyah dan Konsep Transformasi Sosio-Politik Ibn Khaldun: Relevansi Kontemporer Politik dan Tribalisme di Timur Tengah**. Jurnal tersebut mengungkapkan bahwa melalui eksperimen Yordania dan Suriah dalam mengelola tribalisme mengafirmasi relevansi teori *‘asabiyyah* Ibnu Khaldun dan paradigma transformasi sosio-politiknya dalam menganalisis relasi negara dan kelompok kesukuan di Timur Tengah pada era kontemporer. Jika dikelola dengan baik, *‘asabiyyah* dapat menjadi pilar kekuasaan dan

⁴⁰Hanna Widayani, *Ashabiyah Ibnu Khaldun dan Relevansinya dengan Nasionalisme di Indonesia*, *Manthiq: Jurnal Filsafat Agama dan Pemikiran Islam*, Vol. 2. No. 2. (2017). DOI: 10.29300/mtq.v2i2.669

membentuk kohesi sosio-politik yang dapat menciptakan stabilitas. Sebaliknya, jika negara gagal dalam mengelola tribalisme, *'asabiyyah* justru menjadi bumerang yang berpotensi menjadi ancaman bagi kekuasaan.⁴¹

3. Ahmad Sunawari Long. Buku, (2015). **Falsafah Ibnu Khaldun**. Secara luas buku tersebut menjelaskan bahwa salah satu falsafah Ibnu Khaldun ialah mengiktiraf manusia dengan semangat *'asabiyyah* dalam dirinya bahkan secara positif digunakan untuk pembangunan tamadun. Semangat tersebut juga didakwa oleh Ibnu Khaldun sebagai salah satu faktor utama dalam kejayaan Islam, pendorong kepada gerakan Islam pada peringkat awal dan dijadikan syarat dalam menyatukan rakyat. Dengan demikian, di samping agama, *'asabiyyah* dapat dijadikan alat dalam pembinaan kesatuan.⁴²
4. Abdul Rozak, Dasim Budimansyah, Endang Sumantri, dan Udin S. Winataputra. Jurnal, (2015). ***Political Thought and Socio-cultural Nationalism Ideologies of Nurcholish Madjid on Strengthening Democracy, Civil Societies and Civic Virtues in Indonesia***. Jurnal tersebut mengungkapkan bahwa pokok-pokok pemikiran Cak Nur, menurut Budhy Munawar-Rachman, dapat di lihat melalui kategorisasi yang dikemukakan oleh Charles Kurzman yang menyatakan bahwa ada enam isu paling kontroversial di dunia Islam saat ini; teokrasi, demokrasi, gender atau feminisme, pluralisme, kebebasan berpikir, dan cara menerima ide-ide pembaharuan/kemajuan. Melalui enam isu-isu tersebut, gagasan Cak Nur mencakup semua kerangka. Pemikiran dan gerakannya telah membedakan antara masalah agama dan nasional (termasuk pribumisasi), pluralisme, inklusivitas agama, Islam substantif, humanisme, kebebasan berpikir, dan menjadikan Pancasila sebagai dasar akhir bangsa. Sedangkan dalam tataran

⁴¹Nawan Yulianto & Muhamad Syaquillah, Asabiyyah dan Konsep Transformasi SosioPolitik Ibn Khaldun: Relevansi Kontemporer Politik dan Tribalisme di Timur Tengah, *MEIS: Jurnal Middle East and Islamic Studies*, Vol. 6. No. 1. (2019). DOI: <https://doi.org/10.7454/meis.v6i1.76>

⁴²Ahmad Sunawari Long, ed. *Falsafah Ibnu Khaldun*, (Kuala Lumpur: Institut Terjemahan & Buku Malaysia Berhad, 2015).

keislaman, Cak Nur menggunakan pemikiran universalisme Islam sebagai agama yang menginspirasi bagi setiap pemeluk agama di Indonesia.⁴³

5. Eka Zuliana. Tesis, (2015). **Konsep Etika Politik Menurut Pemikiran Nurcholish Madjid**. Tesis tersebut menggunakan metode analisis isi atau analisis tekstual dan metode interpretasi. Tesis tersebut menggunakan pendekatan *normativ* dan *sosio-historis*. Adapun hasil dari penelitian pada tesis tersebut mengungkapkan bahwa menurut Nurcholish Madjid, dalam kehidupan politik setiap insan tidak boleh meninggalkan nilai-nilai keagamaan. Kehidupan politik yang pada dasarnya bersifat duniawi, tidak bisa lepas dari tuntunan moral yang tinggi.⁴⁴
6. Mohmmad Taufiq Rahman & Asep Saeful Mimbar. Jurnal, (2018). **Konsep Politik Islam Kultural Perspektif Nurcholish Madjid**. Jurnal tersebut menggunakan pendekatan kualitatif dengan sifat penelitian normatif dan sosiologis. Adapun hasil dari jurnal tersebut ialah bahwa jika diperbandingkan dengan para pemikir politik Muslim dunia, Nurcholish masih bukan apa-apa. Nurcholish bukan pemikir politik yang menjelaskan apa yang seadanya (*what the really is*) atau yang menggeluti *das sein*, tetapi pada tataran pemikir politik dalam kategori *das sollen*, yang menjelaskan apa yang seharusnya (*what the really ought to be*). Dengan demikian sifatnya lebih normatif ketimbang konseptual. Ia bukan representasi dari ilmu-ilmu empirik seperti ilmu politik atau sosiologi, tetapi representasi dari ilmu-ilmu abstrak seperti filsafat dan cabangnya, etika.⁴⁵
7. Muhammad Saleh Tajuddin. Jurnal, (2021). **Filsafat Politik Nurcholish Madjid**. Jurnal tersebut mengungkapkan bahwa Nurcholish Madjid memiliki ide pemikiran yang cukup kontroversial di kalangan cendekiawan

⁴³Abdul Rozak, Dasim Budimansyah, Endang Sumantri, & Udin S. Winataputra, "Political Thought and Socio-cultural Nationalism Ideologies of Nurcholish Madjid on Strengthening Democracy, Civil Societies and Civic Virtues in Indonesia", Canadian Center of Science and Education, Asian Social Science, Vol. 11, No. 27, (2015). DOI: 10.5539/ass.v11n27p142

⁴⁴Eka Juliana, *Konsep Etika Politik Menurut Pemikiran Nurcholis Madjid*, Tesis, (Medan: Program Pascasarjana UIN-SU, 2015).

⁴⁵ Mohammad Taufiq Rahman & Asep Saeful Mimbar, *Konsep Politik Islam Kultural Perspektif Nurcholish Madjid*, *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial, dan Budaya*, Vol. 3. No. 2. (2018). DOI: <https://doi.org/10.25217/jf.v3i2.308>

Muslim di Indonesia. Nurcholish Madjid banyak menggali khazanah pemikiran intelektual klasik, kemudian diinterpretasikan sesuai dengan perkembangan zaman demi kemajuan negara dan masyarakat Islam. Ia menyadari negara maupun masyarakat Islam sangat jauh tertinggal dalam aspek ilmu pengetahuan dan teknologi dibanding negara-negara Barat. Aspek menarik lainnya adalah pemikirannya tentang konsep *civil society*.⁴⁶

8. Abu Muslim. Buku, (2021). **Nurcholis Madjid dan Politik Muslim**. Buku tersebut disusun melalui pendekatan politik Islam yang dirumuskan Dale F. Eickelman dan James Piscatori. Dalam menganalisis wacana keislaman Nurcholish Madjid, penulis menggunakan pendekatan analisis wacana kritis yang dikembangkan oleh Norman Fairclough. Secara keseluruhan buku tersebut membahas interpretasi Islam Nurcholish Madjid dalam kaitannya politik muslim di Indonesia dan implikasinya.⁴⁷

Melalui uraian di atas, telah banyak kajian yang membahas pemikiran filsafat politik dalam pemikiran Ibnu Khaldun dan Nurcholis Madjid serta relevansinya. Namun belum pernah dilakukannya suatu kajian yang memperbandingkan etika politik dalam pemikiran Ibnu Khaldun dengan etika politik dalam pemikiran Nurcholis Madjid. Dengan demikian penelitian ini akan menjadi sangat menarik dan berbeda dengan penelitian lainnya karena penelitian ini akan menggunakan teknik analisis komparasi simetris, melalui langkah-langkah metodis berupa deskripsi, interpretasi, kesinambungan historis, idealisasi, dan heuristika. Sehingga penelitian ini akan memperlihatkan kekuatan dan kelemahan masing-masing pandangan sebagai upaya untuk melihat relevansi pemikiran etika politik Ibnu Khaldun dan Nurcholis Madjid pada kehidupan politik bangsa Indonesia kini dan nanti. Walaupun demikian penulis akan menggunakan sebagian kecil dari isi penelitian-penelitian terdahulu di atas untuk menambah khazanah dalam penelitian ini.

⁴⁶Muhammad Saleh Tajuddin, Filsafat Politik Nurcholish Madjid, *Jurnal Politik Profetik*, Vol. 9, No. 2. (2021). DOI: <https://doi.org/10.24252/profetik.v9i2a1>

⁴⁷Abu Muslim, *Nurcholish Madjid dan Politik Muslim*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2021).

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian komparatif. Secara umum penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan secara utuh kepada subjek penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Anton Bakker & Achmad Charris Zubair menguraikan bahwa penelitian komparatif bertujuan untuk membandingkan pandangan dari dua (atau lebih) tokoh pemikiran atau aliran.⁴⁸ Adapun objek material penelitian komparatif, yaitu sebagai berikut:

- a. Perbandingan dilakukan pada pandangan/pemikiran yang memiliki kedekatan, dalam satu aliran; atau pandangan/pemikiran yang sangat berjauhan, dalam satu tradisi. Perbandingan juga dilakukan pada pandangan aliran atau tokoh yang terdapat dalam dua tradisi yang jauh berbeda, seperti: barat dan timur.
- b. Perbandingan dilakukan pada salah satu masalah dan mungkin juga pada salah satu bidang kajian, seperti: etika, sosial, politik, ego, dsb.
- c. Perbandingan dilakukan pada pandangan-pandangan yang mungkin merupakan sebuah pertentangan atau kontras dengan pandangan lainnya; mungkin juga pada pandangan dari aliran atau tokoh yang dibandingkan memiliki kemiripan/serupa; serta mungkin juga pandangan dari aliran atau tokoh yang dibandingkan berada dalam satu perspektif, dengan yang pertama masih mencari jalan, dan yang kedua berpikiran lebih radikal dan lebih definitif.

Dengan demikian objek formal dari penelitian ini adalah perbandingan pandangan Ibnu Khaldun dan Nurcholis Madjid mengenai etika politik, sehingga yang diteliti adalah visi-visi Ibnu Khaldun dan Nurcholis Madjid mengenai hakikat manusia, dunia dan Tuhan, dan mengenai norma-norma yang terletak di dalam gagasan etika politik Ibnu Khaldun dan Nurcholis Madjid, serta diteliti juga argumen-argumen yang khas dari Ibnu Khaldun dan Nurcholis Madjid. Adapun

⁴⁸Anton Bakker & Achmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Cet. ke-19, (Yogyakarta: Kanisius, 1990), h.83.

objek material penelitian ini adalah perbandingan pada pandangan dari Ibnu Khaldun dan Nurcholis Madjid mengenai etika politik yang mungkin berada dalam satu perspektif, dengan yang pertama mungkin masih mencari jalan, dan yang kedua mungkin sudah berpikiran lebih radikal dan definitif.

Berdasarkan objek material dari penelitian ini, maka dalam kaitannya dengan sumber data dan pengumpulan data, menurut Kaelan, dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:⁴⁹

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian yang mengkaji objek material berupa karya-karya tokoh yang berupa karya filosofis. Jenis penelitian ini memiliki sumber data yang dikumpulkan dari buku-buku kepustakaan yang berkaitan dengan objek material.

Melalui pemaparan Kaelan di atas dan untuk menyesuaikan dengan objek material dari penelitian ini, maka penelitian ini berjenis penelitian kepustakaan. Menurut Mestika Zeb, riset pustaka atau studi pustaka ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.⁵⁰

2. Sumber Data

Dicari segala literatur yang ada mengenai Ibnu Khaldun dan Nurcholis Madjid, lalu dibagi menjadi pustaka sekunder (sumber sekunder) dan pustaka primer (sumber primer).

a. Sumber Primer

Sumber primer penelitian ini adalah karya-karya pribadi Ibnu Khaldun dan Nurcholis Madjid yang membahas mengenai etika politik. Maka sumber primer penelitian ini ialah Ibnu Khaldun, *Muqaddimah; An Introduction to the History of the World*, Terj. Ahmadie Thaha (2019); Nurcholish Madjid, *Islam, Kemodernan*

⁴⁹Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat; Paradigma Bagi Pengembangan Penelitian Interdisipliner Bidang Filsafat, Budaya, Sosial, Semiotika, Sastra, Hukum dan Seni*, (Yogyakarta: Paradigma, 2005), h.138-139

⁵⁰Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Cet. ke-3, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), h.3.

dan *Keindonesiaan* (1987); Nurcholish Madjid, *Islam Agama Kemanusiaan: Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia* (1995); Nurcholish Madjid, *Islam Agama Peradaban: Membangun Makna dan Relevansi Doktrin Islam dalam Sejarah* (1995); Nurcholish Madjid, *Cita-cita Politik Islam* (1998); Nurcholish Madjid, *Indonesia Kita* (2004). Alasan lebih banyak melakukan kajian terhadap karya-karya Nurcholish Madjid ialah karena Ibnu Khaldun telah secara luas mengggagas suatu etika politik yang terdapat dalam konsep '*ashabiyyah*' di dalam karyanya yang berjudul *Muqaddimah*, sedangkan Nurcholish Madjid tidak memiliki satu karya pun yang memiliki judul yang secara eksplisit mengenai etika politik, tetapi dikarenakan dalam semasa hidupnya Nurcholish Madjid memberikan perhatiannya pada Islam, Kemodernan dan Keindonesiaan, yang pada hakikatnya pemikirannya bercorak filsafat politik, sehingga menuju pada satu tujuan utama, yaitu etika politik.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder penelitian ini adalah monografi dan karangan khusus mengenai Ibnu Khaldun dan Nurcholis Madjid dengan pemikirannya dan juga sumber sekunder dalam penelitian ini ialah pustaka-pustaka umum seperti: sejarah etika, ensiklopedia, kamus politik, dan kamus filsafat. Serta sumber sekunder penelitian ini ialah buku sistematis dan buku tematis seperti: filsafat politik, filsafat etika, filsafat moral. adapun berupa jurnal: *Nurcholish Madjid dan pemikirannya (Diantara Kontribusi dan Kontroversi)*, *Konsep Politik Islam Kultural Perspektif Nurcholish Madjid*,

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik literatur sebagai teknik pengumpulan data. Teknik literatur adalah mencari data-data berupa kajian kepustakaan, artikel, dan situs internet yang sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Setelah data-data yang dibutuhkan telah terkumpul, kemudian penulis akan membaca data-data tersebut. Pada penelitian ini penulis menerapkan dua teknik membaca, yaitu:

a. Membaca pada tingkat simbolik

Teknik membaca pada tingkat simbolik akan diterapkan saat penulis membaca data-data sekunder, seperti ensiklopedia, kamus, buku-buku sistematis, dan buku-buku tematis.

b. Membaca pada tingkat semantik

Teknik membaca pada tingkat semantik akan diterapkan saat penulis membaca data-data primer, seperti karya-karya dari Ibnu Khaldun dan Nurcholis Madjid.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data penelitian ini menggunakan teknik analisis komparasi simetris, yaitu: perbandingan dapat dilakukan setelah masing-masing pandangan diuraikan secara lengkap. Adapun yang diperbandingkan dimulai dengan perumusan masalah, pendekatan, pemakaian istilah, argumentasi, dan contoh-contoh. Dalam teknik analisis komparasi simetris juga dibedakan taraf 25 yang akan dibandingkan, seperti taraf yang tampak dan konkret, atau taraf yang lebih mendalam, sampai pada dasar-dasar asumsi yang paling dasariah. Sebab, bisa saja pada taraf konkret terdapat perbedaan besar dari pemikiran etika politik Ibnu Khaldun dan Nurcholis Madjid, sedangkan pada taraf dasar memiliki kesamaan yang besar. Mungkin juga sebaliknya, pada taraf dasar ada perbedaan besar dari pemikiran etika politik Ibnu Khaldun dan Nurcholis Madjid, sedangkan pada taraf konkret terdapat kesamaan besar. Adapun langkah-langkah metodis teknik analisis komparasi simetris yang digunakan dalam penelitian ialah deskripsi, interpretasi, kesinambungan historis, idealisasi, dan heuristika;

a. Deskripsi

Pemikiran etika politik Ibnu Khaldun dan Nurcholis Madjid diuraikan dengan lengkap dan ketat, sehingga kesamaan dan perbedaan pemikiran etika politik Ibnu Khaldun dan Nurcholis Madjid dapat disajikan dengan jernih dan tepat.

b. Interpretasi

Interpretasi merupakan upaya penting untuk menyikap kebenaran. Dengan demikian hakikat interpretasi ialah tercapainya pemahaman benar mengenai ekspresi manusiawi yang dipelajari. Menurut Anton Bakker dalam interpretasi terdapat berbagai hubungan atau lingkaran-lingkaran yang beraneka ragam dan merupakan satu kesatuan dari unsur-unsur metodis. Lebih lanjut, unsur-unsur tersebut akan memperlihatkan dan menjamin bahwa interpretasi bukan semata-mata merupakan kegiatan yang suka-suka menurut individu yang mengadakan interpretasi, melainkan bertumpu pada *evidensi objektif* dan mencapai kebenaran otentik.⁵¹ Oleh karenanya dalam penelitian ini, metode interpretasi digunakan untuk menyelami karya-karya Ibnu Khaldun dan Nurcholis Madjid, sehingga penulis dapat menangkap nuansa dan makna dari etika politik yang dimaksudkan oleh Ibnu Khaldun dan Nurcholis Madjid masing-masing secara khas.

c. Kesenambungan Historis

Dilihat benang merah dalam pengembangan pikiran Ibnu Khaldun dan Nurcholis Madjid, baik yang berhubungan dengan lingkungan historis (latar belakang eksternal) dan pengaruh-pengaruh yang dialami (latar belakang internal) oleh Ibnu Khaldun dan Nurcholis Madjid. Perihal latar belakang eksternal, penulis akan menyelidiki keadaan khusus zaman yang dialami oleh Ibnu Khaldun dan Nurcholis Madjid, dengan segi sosio-ekonomi, politik, budaya, dan filsafat. Sedangkan bagi latar belakang internal, penulis akan memeriksa riwayat hidup Ibnu Khaldun dan Nurcholis Madjid, berupa pendidikan, pengaruh yang diterima, relasi dengan tokoh-tokoh sezaman, dan segala bentuk pengalaman-pengalaman yang membentuk pemikiran etika politik Ibnu Khaldun dan Nurcholis Madjid.

d. Idealisasi

Pikiran Ibnu Khaldun dan Nurcholis Madjid masing-masing dipahami menurut dinamika dan inti yang semurni mungkin. Sebab dalam kemurnian itu pemikiran etika politik Ibnu Khaldun dan Nurcholis Madjid dapat dibandingkan

⁵¹ Anton Bakker & Achmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat...*, h.61.

secara jujur; dari lain pihak perbandingannya akan dengan lebih tepat memperlihatkan orientasi sebenarnya dalam visinya masing-masing.

e. Heuristika

Sesuai dengan asal katanya yaitu heureka yang artinya adalah “saya telah menemukan(nya).”⁵² Maka berdasarkan perbandingan antara pemikiran etika politik Ibnu Khaldun dan Nurcholis Madjid, dapat menghasilkan suatu pemahaman terbaru, baik mengenai seluruh orientasi pemikiran Ibnu Khaldun dan Nurcholis Madjid, atau hanya mengenai pemikiran etika politik Ibnu Khaldun dan Nurcholis Madjid.

H. Sistematika Pembahasan

Secara umum sebuah penelitian di susun dalam beberapa bab yang terbagi pada tiga bagian, yaitu: pendahuluan, isi, dan penutup. Oleh karenanya untuk memahami penelitian ini, penulis menyusun penelitian ini menjadi beberapa bab yang masing-masing berisi sub-sub bab.

BAB I PENDAHULUAN: Pada bagian ini terdiri dari latar belakang masalah; menguraikan permasalahan dan urgensi dari judul penelitian ini, rumusan masalah; menjabarkan pokok-pokok permasalahan yang berkaitan dengan judul penelitian dan penting untuk di diskusikan di dalam penelitian ini, tujuan penelitian; menguraikan secara umum dan secara khusus tujuan dan sasaran dari penelitian ini, manfaat penelitian; menguraikan manfaat dari penelitian ini dari segi teoritis dan praktisnya, metode penelitian; menguraikan dan menjabarkan jenis, pendekatan, sumber data, instrumen, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data yang digunakan untuk menyelesaikan penelitian ini, kajian terdahulu; menjabarkan penelitian-penelitian sebelumnya dengan tema yang sama dengan penelitian ini, sistematika pembahasan; menjabarkan Bab dan Sub bab pembahasan yang terdapat di dalam penelitian ini.

⁵²Anton Bakker & Achmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat...*, h.88.

BAB II BIOGRAFI IBNU KHALDUN DAN NURCHOLIS MADJID:

Pada bagian ini penulis akan menguraikan secara sistematis riwayat hidup Ibnu Khaldun dan Nurcholis Madjid yang dimulai dari mendeskripsikan kehidupan masa muda dan masa tua, menjabarkan jenjang pendidikan, dan menjabarkan karya-karya dari Ibnu Khaldun dan Nurcholis Madjid.

BAB III PEMIKIRAN ETIKA POLITIK IBNU KHALDUN DAN NURCHOLIS MADJID:

Pada bagian ini penulis akan menguraikan secara mendalam pemikiran etika politik yang terdapat di dalam karya-karya Ibnu Khaldun dan Nurcholis Madjid. Pada bagian ini juga akan menguraikan perbedaan dan persamaan secara hakikat, norma, dan argumentasi dari pemikiran Ibnu Khaldun dan Nurcholis Madjid mengenai etika politik terkhususnya etika politik Islam.

BAB IV RELEVANSI PERBEDAAN DAN PERSAMAAN PEMIKIRAN ETIKA IBNU KHALDUN DAN NURCHOLIS MADJID:

Pada bagian ini penulis akan menguraikan hasil penelitian mengenai perbedaan dan persamaan dari kedua tokoh serta relevansinya pada masyarakat saat ini.

BAB V PENUTUP:

Pada bagian ini penulis akan menguraikan kesimpulan dari penelitian yang telah dilaksanakan oleh penulis; menguraikan jawaban dari rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya di bagian pendahuluan, serta menguraikan kritik dan saran dari penulis untuk masyarakat, pemerintah, dan para akademisi yang akan meneliti tema yang hampir sama dengan penelitian ini.